



Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata: Systematic Literature Review

Nazwa Roskaida Masri¹, Wiwik Handayani²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: nazwaroska@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 12, 2026

Revised June 15, 2026

Accepted June 28, 2026

Available online June 28, 2026

Kata Kunci:

Partisipasi Masyarakat; Tangga Partisipasi Arnstein; Pariwisata Berkelanjutan; Kekuasaan Warga.

Keywords:

Community Participation; Arnstein's Ladder of Participation; Sustainable Tourism; Citizen Power..



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license. Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Tinjauan pustaka sistematis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan berdasarkan sintesis 18 artikel relevan yang dipublikasikan, menggunakan kerangka Tangga Partisipasi Warga Arnstein sebagai pisau analisis utama. Hasil studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat didominasi oleh kategori Tokenisme, mencakup 11 dari 18 studi yang dikaji, mencerminkan praktik Konsultasi (misalnya Gamplong, Ambon) dan Pemberian Informasi. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun komunitas lokal diberikan peluang untuk menyampaikan masukan, mereka secara konsisten tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan yang mengikat, yang menyebabkan disparitas antara harapan dan hasil program. Sebaliknya, Kekuasaan Warga (Citizen Power) berhasil dicapai dalam 6 studi, menegaskan adanya model Community-Based Tourism (CBT) yang otentik. Tingkat partisipasi tertinggi, seperti Kemitraan (misalnya Gunung Salak, Cireundeu) dan Kontrol Warga (misalnya Cisampih, Tebing Breksi), membuktikan bahwa transfer kekuasaan dan pembagian tanggung jawab secara eksplisit merupakan faktor krusial dalam membangun tata kelola pariwisata yang akuntabel. Dengan

demikian, keberlanjutan pengembangan pariwisata sangat bergantung pada pergeseran paradigma dari sekadar melibatkan menuju memberdayakan komunitas lokal melalui reformasi struktural dalam mekanisme tata kelola.

ABSTRACT

This systematic literature review aims to identify and critically analyze the forms of community participation in sustainable tourism development based on the synthesis of 18 relevant published articles, utilizing Arnstein's A Ladder of Citizen Participation as the primary analytical framework. The study results indicate that community participation is predominantly concentrated in the Tokenism category, encompassing 11 out of 18 studies reviewed, reflecting practices such as Consultation (e.g., Gamplong, Ambon) and Informing. This pattern suggests that while local communities are provided opportunities to offer input, they consistently lack binding authority in final decision-making, which consequently leads to a persistent disparity between expectations and program outcomes. Conversely, Citizen Power was successfully achieved in 6 studies, affirming the existence of authentic Community-Based Tourism (CBT) models. The highest levels of participation, such as Partnership (e.g., Gunung Salak, Cireundeu) and Citizen Control (e.g., Cisampih, Tebing Breksi), demonstrate that the explicit transfer of power and shared responsibility is the crucial factor in establishing accountable and sustainable tourism governance. In conclusion, the sustainability of tourism development is critically dependent on a paradigm shift from merely involving (Tokenism) to genuinely empowering (Citizen Power) local communities through structural reforms in governance mechanisms.

1. PENDAHULUAN

Pariwisata berkelanjutan menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan karena perlunya pengembangan sektor pariwisata yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi juga melibatkan tanggung jawab terhadap lingkungan alam (Saputra, 2024). Selain itu, pariwisata dapat menjadi alat pengembangan yang potensial karena mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, mendorong diversifikasi ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan hubungan timbal balik dengan sektor produksi dan penyedia jasa lainnya (M. Rezki Ramadani & Mayarni, 2021). Dengan berkembangnya sektor pariwisata, keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara merata oleh penduduk sekitar (Dinis Cahyaningrum et al., 2024). Namun apabila masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dan perannya tidak terdefiniskan dengan jelas, maka manfaat pariwisata cenderung hanya akan dinikmati oleh kelompok tertentu dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penduduk lokal.

Meskipun ada banyak bukti mengenai manfaat partisipasi masyarakat, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi partisipasi tersebut bervariasi di berbagai destinasi wisata. Studi Goa Pindul, Yogyakarta, menyebutkan bahwa masyarakat disana memang terlibat dalam aktivitas wisata, tetapi mereka jarang dilibatkan dalam tahap evaluasi destinasi karena sistem monitoring yang belum kuat dan keterbatasan peran pengelolaan desa (Musadad, 2018). Di Desa Kebon Ayu, Lombok, hampir seluruh penduduk ikut terlibat dalam kegiatan desa wisata, namun terdapat hambatan seperti akses modal yang terbatas, fasilitas yang kurang memadai, dan kesiapan masyarakat dalam kemampuan teknis menjadi kendala utamanya (Sifa'ul Jannah et al., 2023). Keberagaman temuan ini menunjukkan bahwa perlunya adanya tinjauan komprehensif terhadap penelitian untuk memahami pola, hasil, dan manfaat partisipasi masyarakat dalam konteks pariwisata yang lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk tinjauan sistematis terhadap peran krusial partisipasi masyarakat dalam konteks pengembangan pariwisata berkelanjutan berdasarkan studi-studi terdahulu yang telah dipublikasikan. Meskipun partisipasi telah menjadi kunci keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat, tetapi masih terdapat keragaman dan ambiguitas dalam praktik serta dampaknya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama yaitu, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat yang diklasifikasikan dan diimplementasikan dalam kontribusi terhadap keberlanjutan pariwisata di berbagai konteks wilayah? Dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini memfokuskan satu permasalahan utama yaitu, untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dengan menganalisis secara rinci bentuk-bentuk kontribusi yang telah diimplementasikan oleh masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata berdasarkan studi terdahulu.

Literature Review

Pembangunan Keberlanjutan

Penelitian ini berlandaskan pada *Sustainable Development Theory* yang menegaskan bahwa pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara 3 pilar keberlanjutan (*three pillars of sustainability*). Pilar yang dimaksud adalah dimensi

ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan menuntut integrasi antara tiga pilar keberlanjutan dalam mencapai tujuan dan pembangunan jangka panjang. Pada dimensi ekonomi, berfokus pada penciptaan nilai ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi komunitas lokal melalui pengembangan peluang kerja, diversifikasi sumber pendapatan, serta distribusi manfaat yang proposional. Dimensi sosial budaya menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat, pelestarian identitas lokal, serta pemerataan akses terhadap hasil pembangunan agar masyarakat ikut berperan sebagai pelaku utama pembangunan tersebut, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Dimensi lingkungan menekankan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kehati-hatian, pengurangan dampak negative terhadap ekosistem, serta pelestarian fungsi ekologis yang menjadi dasar bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi dan sosial (Ben Purvis et al., 2018).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam sektor pariwisata berhasil menghasilkan dampak signifikan terhadap ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Pada penelitian (Maradita & Aprirachman, 2023) menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada aspek ekonomi, pengutan peran komunitas loka dalam dimensi sosial budaya, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam oengelolaan lingkungan. Penelitian (Pratama et al., 2024) di Desa Wisata Pulesaru dan penelitian Widayanti et. Al 2025 di Kawasan ekowisata mangrove Bali juga mengonfirmasi bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata sangat ditentukan oleh keterpaduan tiga pilar keberlanjutan. Dengan begitu, hasil-hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa *Sustainable Development Theory* tidak terbatas pada tataran konseptual, tetapi memiliki relevansi aplikatif dalam menjelaskan dinamika pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dimana masyarakat memiliki peran aktif dalam menjaga keseimbangan antar dimensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

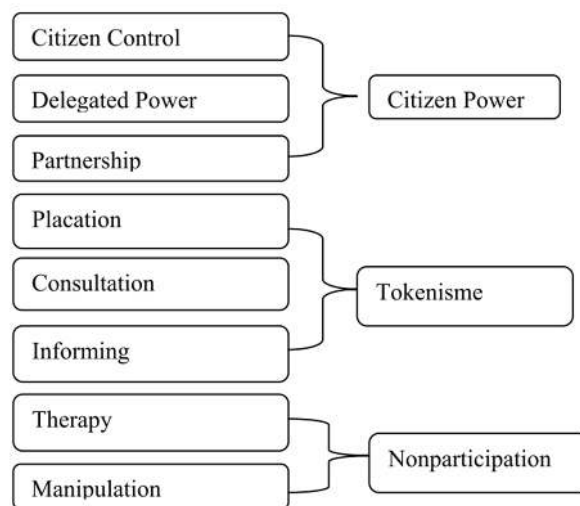
Community Based Tourism

Teori *Community Based Tourism* (CBT) menyebutkan masyarakat lokal harus berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan dan pengembangan wisata. Teori ini menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Syarifuddin, 2023). Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat (Fitria Andjanie et al., 2023a). CBT mengedepankan tiga tujuan utama yaitu menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat lokal, melestarikan nilai-nilai sosial budaya, dan menjaga keberlanjutan (Hutnaleontina et al., 2022).

Dalam perspektif teoritis, konsep CBT dapat dipahami sebagai penerapan nyata dari *Sustainable Development Theory*, yang mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian sosial dan lingkungan melalui prinsip tata kelola yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Selain berperan sebagai strategi dalam pengembangan wisata, CBT juga sebagai alat yang mendukung pemberdayaan sosial yang berguna untuk memperkuat kemandirian serta ketahanan masyarakat lokal. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dan mengelola perubahan yang terjadi akibat dinamika industri pariwisata modern, serta mendorong terciptanya manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat (*community participation*) telah diakui secara luas sebagai elemen mendasar dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan, karena menjamin keselarasan antara tujuan pembangunan dan kebutuhan sosial budaya komunitas lokal (Jamal & Getz, 1995). Konsep partisipasi sendiri bukanlah kondisi tunggal, melainkan merepresentasikan suatu spektrum yang menunjukkan derajat control dan pengaruh masyarakat terhadap keputusan. Kerangka teoritis yang paling berpengaruh untuk menganalisis spektrum ini adalah Tangga Partisipasi (*Ladder of Participation*) yang diperkenalkan oleh Sherry Arnstein (1969). Arnstein mengategorikan partisipasi ke dalam delapan tingkat, yang berkisar dari tingkat terendah yaitu "*Non Participation*" yang terdiri dari *manipulation* dan *therapy*, yang berfungsi sebagai penguasa untuk melegatimaasi agenda mereka. Tingkat menengah yaitu "*Tokenism*" yang terdiri dari *informing*, *consultation*, dan *placation*. Tingkat puncaknya adalah "*Citizen Power*" yang terdiri dari *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*. Dalam konteks pengembangan pariwisata, model partisipasi Arnstein ini digunakan sebagai alat analisis kritis untuk mengkaji berbagai studi sebelumnya dengan mengklasifikasikan apakah keterlibatan masyarakat sebatas pemberian informasi atau telah mencapai tingkat kemitraan sejati dan pengendalian asset yang berkorelasi kuat dengan hasil dan manfaat positif serta faktor pendorong yang kuat.



Gambar 1. Tangga partisipasi Arnstein
Sumber : Arnstein (1969)

Tingkat *Nonparticipation* terdapat dua tingkatan di dalamnya yaitu *Manipulation* dan *Therapy*. Pada tingkat *Manipulation*, tidak adanya komunikasi karena tujuan awal tingkat ini bukan untuk melibatkan masyarakat melainkan mendidik masyarakat. Tingkat *Therapy* telah ada komunikasi namun masih terbatas satu arah, hanya dari pemerintah saja. Masyarakat telah dilibatkan, namun tujuan utamanya untuk mengobati.

Tingkat *Tokenism* terdapat tiga tingkat yaitu, *Information*, *Consultation*, dan *Placation*. Pada tingkat *Informing*, komunikasi telah meningkat namun masih bersifat satu arah. Informasi diberikan kepada masyarakat namun mereka tidak berkesempatan untuk berkomentar. Tingkat *Consultation* sudah terdapat komunikasi yang bersifat dua arah namun sifat partisipasi masih bersifat ritualistik. Hal ini dilihat dari adanya rangkaian prosedur formal untuk mengajukan aspirasi dan harapan suara untuk didengar, namun tidak ada jaminan bahwa aspirasi tersebut akan terkabul. Sudah ada peningkatan komunikasi dan negosiasi antara masyarakat dan pemerintah pada tingkat *Placation*, namun pemerintah tetap memegang wewenang atas keputusan akhir.

Tingkat *Citizen Power* terdiri dari tiga tingkat di dalamnya yaitu, *Partnership*, *Delegated Power*, dan *Citizen Control*. Pada tingkat *Partnership* masyarakat dan pemerintah mempunyai kedudukan yang sama. Adanya perundingan antara perundingan antara masyarakat dan pemerintah, dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Tingkat *Delegated Power*, pemerintah telah memberi hak kepada masyarakat untuk mengelola sebagian wilayahnya sendiri, masyarakat mempunyai kewenangan yang jelas dan tanggung jawab penuh atas keberhasilan program tersebut. Tingkat teratas yaitu *Citizen Control*, disini masyarakat sudah sepenuhnya mengelola seluruh kegiatan untuk kepentingan Bersama tanpa adanya campur tangan dari pemerintah (A. P. Pratiwi et al., 2025).

Partisipasi Masyarakat penting dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas (CBT). Dalam konteks pariwisata berbasis komunitas, masyarakat lokal memiliki peran yang sangat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam kegiatan pariwisata (Wawo et al., 2025). Menurut penelitian (Wawo et al., 2025), dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Sopapei, partisipasi masyarakat termasuk dalam kategori "*fair participation*", yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keterlibatan yang cukup dalam pengelolaan pariwisata tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis secara mendalam berbagai hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata berkelanjutan. Pendekatan SLR dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap penelitian ilmiah terdahulu, mengidentifikasi gap penelitian, serta merumuskan arah pengembangan konsep secara konseptual dan aplikatif (Snyder, 2019).

Proses identifikasi dilakukan dengan mencari literature di Scopus dan Google Scholar. Pencarian data dalam penelitian menggunakan beberapa tahapan sistematis. Pertama, pencarian kata kunci "*community participation*", "*tourism village*", dan "*A Ladder of Citizen Participation*" untuk di scopus dan "*partisipasi masyarakat*", "*pembangunan pariwisata*" "*desa wisata*", dan "*A Ladder of Citizen Participation*" untuk di google scholar. Kedua, melakukan screening judul dan rentang tahun dari 2020 hingga 2025. Ketiga, screening dengan membaca abstrak dan tujuan penelitian. Keempat, dari artikel-artikel terpilih, dilakukan screening terakhir dengan membaca keseluruhan artikel dengan fokus yang sama. Kelima, menyajikan proses seleksi literatur secara visual dengan diagram alur PRISMA.

Tabel 1. Diagram Alur PRISMA

No	Database	Kata Kunci Pencarian	Hasil Awal	Setelah Screening	Artikel Terpilih	Keterangan Relevansi
1	Scopus	"Community Participation", "Tourism Development", "tourism village" dan "A Ladder of Citizen Participation"	85	16	6	Penelitian yang menggunakan teori <i>Ladder of Participation</i> (Arnstein, 1969).
2	Google Scholar	"Partisipasi Masyarakat", "Pembangunan Pariwisata", "Desa Wisata", dan "A Ladder of Citizen Participation"	91	20	12	Penelitian yang fokus pada pariwisata, membahas partisipasi masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini menyajikan temuan komprehensif dari analisis Systematic Literature Review (SLR) terhadap 18 studi primer yang secara substansial membahas implementasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, terutama yang berfokus pada pengelolaan destinasi, dampak ekonomi lokal, dan pelestarian budaya. Proses analisis literatur dilakukan dengan mengelompokkan data struktur dari setiap penelitian ke dalam kategorisasi tematik yang merespons rumusan masalah yang telah ditetapkan secara langsung.

Fokus utama temuan bertujuan untuk mengukur derajat keterlibatan masyarakat dengan memetakannya pada kerangka Tangga Partisipasi (*Ladder of Participation*) (Sherry Arnstein 1969). Kerangka ini digunakan untuk menilai bentuk partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk partisipasi tenaga, pikiran, keahlian, atau barang maupun uang. Bentuk partisipasi ini dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kontrol yang dimiliki masyarakat, mulai dari tingkat *Non Participation*, tingkat *tokenism*, hingga ke *Citizen Power*. Melalui penerapan kerangka tersebut, penelitian ini tidak hanya memetakan pola-pola partisipasi dari berbagai konteks wilayah, tetapi juga menegaskan hubungan fungsional antara tingkat partisipasi dan keberhasilan atau keterbatasan manfaat yang diperoleh masyarakat dari aktivitas pariwisata.

Tabel 2. Hasil Analisis SLR Penelitian

No	Judul	Peneliti	Wilayah	Tingkat Partisipasi
1	Community Participation Level of Penggung Village on the Agropolitan Region Development in Kecamatan Bandar Nawangan, Kabupaten Pacitan (J. R. Pratiwi et al., 2023)	Jenvia Pratiwi, Rista Rita, Parmawati, Ridwan Muhammad Rifai (2023)	Desa Penggung	Informing (Tokenism)
2	Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cikura Kecamatan Bojong kabupaten Tegal (Tri Amanah et al., 2023)	Rifky Tri Amanah, Augustin Rina Herawati, Teuku Afrizal (2023)	Desa Cikura, Tegal	Placation (Tokenism)
3	Participation of Farmers in Counseling and Technical Training Activities for Merang Mushroom Cultivation in Kutaampel Village, Batujaya District, Karawang (Mariyani & Lestari, 2021)	Siti Mariyani, Ani Lestari (2021)	Desa Kutaampel, Karawang	Consultation (Tokenism)
4	Partisipasi Masyarakat Gampong TGK Dilaweung Terhadap Pelestarian Terumbu Karang di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie (Zalmita et al., 2020)	Novia Zalmita, M. Hafizul Furqan, Zul Ustrati (2020)	Muara Tiga, Pidie	Citizen Control (Citizen Power)
5	Pengelolaan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sawentar) (Fuadi Laksono et al., 2020)	Nurfi Fuadi Laksono, Anif Fatma Chawa, Yayuk Yuliati (2020)	Desa Sawentar	Informing (Tokenism)
6	Community Participation in Tourism Village Development and Its Impact on Local Community Economies (Fany Permana & Dewi, 2023)	Aji Fany Permana, Endah Oktafiana Dewi (2023)	Desa Cisuru	Placation (Tokenism)

7	Women's Participation in Sustainable Tourism Village Development: Shifting from Tokenism to Meaningful Participation (Fifiyanti et al., 2025)	Debby Fifiyanti, Nurvia Nathasya, Fernando Africano (2025)	Desa Wisata Burai	Consultation, Placation (Tokenism)
8	Community-based Awareness Model of Development Participation: A Case Study in Cisampih Village, Banjarsari District, Lebak Regency, Banten Province (Suhartono et al., 2025)	Bambang Suhartono, Firman Hadi Rivai, Grace Aprilita Hia, and Mariman Darto (2025)	Desa Cisampih	Partnership & Citizen Control (Citizen Power)
9	Analyzing local community participation and barriers in tourism village development: A case study of Mekarlaksana Village (Yuniastoeti & Rahmafitria, 2024)	Vani Yuniastoeti, Fitri Rahmafitria (2024)	Desa Merkarlana	Consultation (Tokenism)
10	Effect of Community Participation Levels on Tourism Village Development (Puspitasari Rochman et al., 2023)	Gina Puspitasari Rochman, Lely Siddatul Akliyah, Irland Fardani, Tarlani Tarlani, Faizal Hamada, Halimah Nurhasanah	Lamajang	Consultation (Tokenism)
11	The Community Participation in the Development of Gunung Salak Tourism Village, Tabanan, Bali, Indonesia (Suarta et al., 2022)	I Ketut Suarta, I Nyoman Meirejeki, I Ketut Suja, Ruju Rahmad, I Gusti Bagus Rai Utama	Gunung Salak, Tabanan	Partnership (Citizen Power)
12	Partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi daya tarik wisata Pantai Sungai Kinjil	Atania Putri Pratiwi, Erni Yuniarti, Nana Novita Pratiwi, Meta Indah Fitriani, dan Anthy	Pantai Sungai Kinjil	Therapy (Non Participation)

		Septianti		
13	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Wisata Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat (Syarifuddin, 2023)	Didin Syarifuddin (2023)	Kampung Wisata Cireundeu	Partnership (Citizen Power)
14	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong	Safrilul Ulum & Dewi Amanatun Suryani (2021)	Desa Wisata Gamplong, DIY,	Consultation (Tokenism)
15	Strengthening Community Involment: An In-Depth Exploration of The Community-Based Tourism (CBT) Approach In Lamajang Tourism Village, Bandung Regency (Fitria Andjanie et al., 2023)	Isabella Fitria Andjanie, Nurul Asyifa, Ricky Karya Pratama, Alhilal Furqan (2023)	Bandung	Partnership (Citizen Power)
16	Evaluasi Dampak Pembangunan Pariwisata Menggunakan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Kawasan Wisata Tebing Breksi	Nurwanto (2020)	Kawasan wisata Tebing Breksi, DIY	Delegated Power (Citizen Power)
17	The Participation Level of The Local Community Towards Community-Based Tourism Develompment in Sopapei Tourism Destination, Ambon, Indonesia	Mintje Wawo, Johannes Maarthen Stephanus Tetelepta, Frederik Willem Ayala, Juliaeta Adriana Bertha Mamesa, Rahman, Treali Bernard Hehakaya (2025)	Ambon	Consultation & Placation (Tokenism)
18	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kelurahan Pasir Kota Pariaman	Agnes Frischa Aulia & Mira Hasti Hasmira (2020)	Indonesia, Pariaman	Consultation & Placation (Tokenism)

Pembahasan

Hasil Hasil analisis dari 18 studi yang dikaji, menggunakan kerangka Tangga Partisipasi Arnstein, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata lebih cenderung pada tingkat *Tokenism*, yang berada di

tingkat *consultation* dan bukan pada tingkat *citizen control*. Partisipasi seperti gotong royong dan pemberian informasi menandakan bahwa masyarakat seringkali berperan pasif untuk pembuatan keputusan, dan lebih sering sebagai sumber data daripada sebagai pengambilan keputusan inti. Walaupun terdapat partisipasi keahlian yang mengindikasikan kemitraan ekonomi seperti menjual makanan khas daerahnya, namun kontrol ini seringkali terbatas pada mata pencaharian individu dan bukan pada pengelolaan destinasi secara kolektif, yang dimana kekuasaan akhirnya masih dipegang oleh pemerintah atau sektor swasta.

Tingkat Non Participation

Tingkat Non participation terdiri dari manipulation dan therapy di dalamnya. Hal ini menandai tingkat terendah pada tangga partisipasi Arnstein, yang dimana tidak adanya keterlibatan dan kekuasaan masyarakat secara penuh. Dari hasil studi literatur dari ke 18 studi, tingkat non participation menduduki peringkat frekuensi terendah karena hanya ada satu studi yang berada di tingkat ini. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar praktik pengembangan pariwisata yang telah diteliti sudah bergerak melampaui penggunaan masyarakat semata-mata sebagai objek, hal ini menjadi sinyal positif dalam implementasi konsep *community based tourism* (CBT).

a. Manipulation

Hasil dari studi literatur ke 18 penelitian menunjukkan bahwa tidak ada satu pun yang secara eksplisit menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat di tingkat *manipulation*. Tingkat manipulation terjadi Ketika penguasa menggunakan partisipasi masyarakat dengan tujuan Pendidikan palsu, tanpa adanya niat yang nyata untuk memberi kekuasaan atau pengaruh penuh. Tidak adanya tingkat *manipulation* ini menunjukkan bahwa penelitian yang difokuskan pada konteks pengembangan desa wisata cenderung menginvestigasi sekema pelibatan yang setidaknya telah beranjak ke tingkat komunikasi yang lebih terbuka, meskipun komunikasi tersebut masih bersifat satu arah. Namun, tingkat partisipasi terendah adalah *therapy*, yang memiliki indikasi keterbatasan yang harus diwaspadai agar otoritas pariwisata tidak hanya implisit mengarah pada praktik manipulatif, yang dimana masyarakat hanya diyakinkan bahwa mereka berpartisipasi padahal kenyataan di lapangan berbeda.

b. Therapy

Satu dari 18 penelitian teridentifikasi berada pada tingkat *therapy*. Kasus partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi daya tarik wisata Pantai Sungai Kinjil berada pada tingkat ini karena partisipasi masyarakat sudah ada namun masih dibatasi. Masyarakat belum sepenuhnya mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan dan peran mereka masih dibimbing oleh pemerintah (A. P. Pratiwi et al., 2025). Bentuk partisipasi ini bersifat edukatif, yang berfokus pada membuat masyarakat merasa lebih baik dan terdidik mengenai masalah, namun tidak diberikan kekuasaan yang nyata.

Partisipasi tingkat *theory* dalam pengembangan pariwisata menyiratkan bahwa otoritas mungkin memandang masyarakat sebagai pihak yang bermasalah atau kurang informasi dan memerlukan intervensi untuk menyesuaikan pandangan

pandangan mereka dengan kebijakan yang sudah ditetapkan, bukan sebagai mitra yang setara dalam perencanaan. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa pada kasus tersebut, isu kekuasaan struktural tetap tidak tersentuh, sehingga praktik ini gagal mendorong kemandirian dan kontrol warga yang esensial bagi pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu, *therapy* merupakan titik krisis yang harus dihindari, sebab meski melibatkan masyarakat terjadi, gunanya untuk mempertahankan status kekuasaan, bukan untuk mentransformasi relasi antara pengelola dan komunitas lokal.

c. Tokenism

Dominasi *tokenism* dalam tinjauan ini menjadi temuan kunci yang merefleksikan dinamika partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Sebanyak 11 dari 18 studi yang telah dikaji berada di tingkat *tokenism* yang meliputi tingkat *informing*, *consultation*, dan *placation*. Secara struktural, kategori ini memungkinkan masyarakat untuk didengar, namun kekuasaan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan tetap dipegang oleh pihak penguasa. Dalam konteks teoritis, dominasi *tokenism* menggarisbawahi tantangan mendasar dalam implementasi pariwisata berbasis masyarakat, yang dimana pelibatan masyarakat lebih bersifat simbolis untuk memenuhi masyarakat administratif atau meraih legitimasi sosial, dan bukan untuk memindahkan kontrol.

d. Informing

Tingkat *informing* merupakan bentuk partisipasi paling dasar dalam *tokenism*. Komunikasi di tingkat sudah meningkat dari tingkat sebelumnya namun masih bersifat satu arah. Pemerintah atau pihak yang lebih berkuasa menyediakan informasi kepada masyarakat, tetapi masyarakat tidak dapat berkomentar. Penelitian mengenai pengembangan Kawasan argopolitan di Desa Penggung menunjukkan bahwa partisipasi diklasifikasikan sebagai *informing* karena pemerintah hanya melakukan sosialisasi pembangunan untuk memenuhi konversi penyebaran informasi. Meskipun partisipasi tidak dilarang, masyarakat tetap tidak memiliki kebebasan dan keleluasaan yang cukup untuk mengemukakan ide, pendapat, dan kebutuhan mereka (J. R. Pratiwi et al., 2023).

Studi kasus di Desa Sawentar juga berada di tingkat *informing*. Pengelolaan pariwisata belum berjalan dengan optimal dan partisipasi masih terbatas pada tingkat *informing*. Keterbatasan utama yang dihadapi masyarakat di sana adalah kurangnya alur komunikasi dengan mitra kerja serta konflik antara organisasi (Fuadi Laksono et al., 2020). Pada tingkat ini, masyarakat bertindak sebagai penerima pasif dari rencana atau kebijakan yang telah disusun, tanpa adanya jaminan bahwa umpan balik mereka memobilisasi pengetahuan dan sumber daya lokal secara efektif, sehingga menjauhkan dari prinsip tata kelola pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, tingkat *informing* menghasilkan pengetahuan awal di tingkat komunitas, seperti adanya program atau pelatihan kepada masyarakat. Bentuk partisipasi ini cenderung menghasilkan implementasi program yang kaku dan kurang adaptif terhadap kebutuhan lokal. Komunikasi satu arah dapat menimbulkan ketidakpuasan karena masyarakat merasa hanya dijadikan objek pelengkap sosialisasi. Hasil yang paling nyata dari tingkat *informing* adalah

pencapaian kepatuhan procedural, namun gagal dalam menciptakan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) yang kuat di kalangan masyarakat. Hal ini karena keputusan telah diputuskan sebelum masyarakat diberi tahu, sehingga hasil pengembangannya rentan terhadap kegagalan jangka panjang karena kurangnya dukungan dan mobilisasi sumber daya lokal yang tulus.

e. Consultation

Tingkat *consultation* menjadi tingkat yang paling dominan di antara tingkat-tingkat yang ada di tokenism, hal ini menunjukkan bahwa sudah ada kemajuan karena masyarakat secara formal telah diberikan kesempatan untuk memberi masukannya. Masyarakat sudah terlibat di dimensi kontribusi dan saran. Namun, tetap terdapat kesenjangan antara memberi masukan dengan pengambilan keputusan akhir. Tetap tidak ada jaminan bahwa masukan yang diberikan oleh masyarakat diterima atau diwujudkan.

Analisis rinci terhadap studi kasus menindikasikan adanya pola yang konsisten pada tingkat ini. Penelitian di Desa Kutaampel, Karawang, menunjukkan adanya kesadaran sukarela untuk terlibat dalam penyuluhan dan pelatihan teknis budidaya jamur. Masyarakat memiliki kemampuan untuk mengemukakan pendapat, saran, dan ide dalam forum yang telah disediakan (Mariyani & Lestari, 2021). Dalam konteks pariwisata budaya di Desa Mekarlaksana, studi menunjukkan bahwa masyarakat juga aktif mengemukakan ide dan saran terkait pengembangan desa wisata (Yuniastoeti & Rahmafitria, 2024). Hal ini diperkuat oleh temuan studi kasus di Desa Wisata Gamplong, dimana masyarakat diberikan peluang untuk menyampaikan ide, pendapat, dan saran, meskipun keputusan akhir tetap diputuskan oleh pihak yang lebih berwenang (Safrilul Ulum & Dewi Amanatun Suryani, 2021). Praktik semacam ini menguatkan pandangan bahwa masukan masyarakat berfungsi sebagai pengayaan data, dan bukan sebagai penentu kebijakan.

Penelitian di Ambon juga mengonfirmasi bahwa partisipasi masyarakat lokal di destinasi wisata berada pada tingkat *consultation* karena masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pihak yang berwenang (Wawo et al., 2025). Bahkan, pada penelitian di Kelurahan Pasar, Kota Pariaman, masyarakat dilibatkan untuk memberikan masukan oleh pemerintah dan ada tingkat partisipasi masyarakat mendukung kegiatan, seperti berpartisipasi dalam acara adat, yang masih diklasifikasikan berada di tingkat *consultation* karena peran sentral mereka tetap sebatas penyediaan masukan (Aulia & Hasmira, 2020).

Praktik *consultation* kerap menimbulkan kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan hasil akhir program. Meskipun proses ini menghasilkan kumpulan data masukan dan kritik yang berpotensi meningkatkan program, masukan tersebut belum tentu benar-benar digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dampaknya, proses *consultation* ini hanya menjadi formalitas, seolah-olah masyarakat dilibatkan, tetapi suara mereka tidak memengaruhi keputusan apapun. Proses ini akhirnya hanya dipakai untuk menenangkan masyarakat, agar mereka merasa didengarkan, meskipun pendapat mereka belum tentu diimplementasikan. Kondisi ini membuat masyarakat merasa kontribusinya tidak memiliki pengaruh nyata

karena keputusan akhir tetap berada di luar kendali mereka. Pada akhirnya, situasi tersebut dapat menimbulkan konflik, yang berdampak pada berkurangnya efektivitas implementasi pembangunan pariwisata serta menghambat keberlanjutan destinasi wisata.

f. Placation

Tingkat *placation* adalah tingkat tertinggi dari tokenism. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh ruang partisipasi yang terbatas melalui mekanisme perwakilan, namun kendali terhadap keputusan tetap berada di tangan yang berwewenang. Penelitian di Desa Cikura masyarakat memang diberikan kesempatan untuk menyampaikan kritik, namun penentuan program pembangunan tetap sepenuhnya dipegang oleh pihak pemerintah desa melalui forum lanjutan yang tidak melibatkan masyarakat (Tri Amanah et al., 2023). Dominasi kepentingan politik dalam pelaksanaan program semakin menegaskan praktik tersebut. Sementara itu, di Desa Cisuru, masyarakat pada umumnya masih berperan sebagai pelaksana dari rencana yang telah dirumuskan oleh pemerintah desa dan POKDARWIS, sehingga belum mendapatkan keterlibatan yang bermakna pada setiap tahapan pengembangan wisata (Fany Permana & Dewi, 2023).

Hasil nyata dari tingkat *placation* adalah terbentuknya ilusi kerjasama yang bertujuan untuk meredam potensi konflik maupun resistensi dari masyarakat. Melalui mekanisme ini, pihak otoritas mampu mendapatkan dukungan paripisal dari segmen masyarakat dengan melalui perwakilan atau komite tanpa harus menyerahkan kekuasaan secara signifikan. Namun, praktik ini seringkali menimbulkan ketidakseimbangan manfaat yang cenderung menguntungkan kelompok yang memiliki koneksi atau representasi, sementara mayoritas masyarakat terbatas pada peran sebagai kepala teknis. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan struktur kelembagaan lokal yang independent dan menghambat munculnya kepemimpinan masyarakat yang kuat untuk mengelola pariwisata secara mandiri.

g. Citizen Power

Tingkat *citizen power*, yang terdiri dari tingkat *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*, adalah tingkat tertinggi pada Tangga Partisipasi Arnstein dan menjadi indikator kunci keberhasilan implemementasi *Community Based Tourism* (CBT). Terdapat 6 dari 18 penelitian yang telah dikaji, menunjukan bahwa meskipun jumlahnya lebih sedikit dari tingkat *tokenism*, tetapi terdapat praktik-praktik nyata di Indonesia yang telah berhasil melakukan transfer kekuasaan dari otoritas formal kepada komunitas lokal. Bentuk partisipasi ini menegaskan adanya kesetaraan wewenang dan pembagian tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, yang merupakan fondasi esensial untuk menjamin pariwisata berkelanjutan.

h. Partnership

Tingkat *partnership* dapat tercapai apabila kekuasaan didistribusikan secara seimbang, dimana otoritas formal dan masyarakat sepakat untuk berbagi perencanaan dan pengambilan keputusan melalui mekanisme kelembagaan yang terstruktur. Penelitian di Gunung Salak menunjukkan bahwa kemitraan ditandai dengan posisi pemerintah desa dan masyarakat yang menjadi setara dalam

wewenang dan tanggung jawab (Suarta et al., 2022). Kesetaraan ini mendorong inisiatif kolektif dan mengurangi potensi konflik kepentingan antara pengelola dan komunitas.

Penelitian di Kampung Wisata Cireundeu menunjukkan bahwa masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang meliputi tahap perencanaan hingga pengelolaan (Syarifuddin, 2023). Sementara pada penelitian di Lamajang, masyarakat lokal di sana tidak hanya mengelola dan mengembangkan potensi wisata, melainkan juga memiliki suara yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan terlibat dalam pengelolaan lingkungan (Fitria Andjanie et al., 2023). Hal ini juga dilakukan pada penelitian di Desa Cisampih yang juga menunjukkan kemitran kuat karena masyarakat di sana terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan (Suhartono et al., 2025). Integrasi kontribusi masyarakat ini memastikan bahwa inisiatif pariwisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai budaya dan kelestarian lingkungan. Kemitraan menjamin bahwa manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari pariwisata tersebut dapat didistribusikan secara lebih merata.

i. Delegated Power

Delegated power adalah tingkat kedua teratas setelah dari *partnership*. Tingkat ini menunjukkan dimana otoritas formal secara eksplisit mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan utama dan pengelolaan sumber daya tertentu kepada masyarakat. Penelitian di Kawasan Tebing Breksi menunjukkan adanya praktik *delegated power*. Partisipasi masyarakat di sana bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi mereka telah diakui sebagai pelaku ekonomi dan pengelola kawasan bersama (Nurwanto, 2020). Delegasi ini diwujudkan melalui mekanisme yang dimana masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya berbagi peran dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kawasan, dan menegaskan adanya penyerahan wewenang yang substansial.

Impelementasi *Delegated Power* menghasilkan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat secara signifikan. Pemberian wewenang kepada masyarakat lokal dapat mendorong masyarakat untuk mengembangkan keahlian manajerial, keuangan, dan pemasaran secara mandiri, yang membuat terbentuknya kemandirian ekonomi. Delegasi kekuasaan di penelitian Tebing Breksi menunjukkan adanya desentralisasi manajemen pariwisata yang memungkinkan pengambilan keputusan operasional dan strategi dilakukan lebih cepat dan responsif oleh masyarakat di lapangan (Nurwanto, 2020). Hal ini merupakan strategi penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, dan juga meningkatkan akuntabilitas pengelola wisata terhadap komunitas.

j. Citizen Control

Tingkat *citizen control* adalah tingkat partisipasi yang tertinggi, dimana kelompok masyarakat memegang penuh atas kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan. Masyarakat telah menjadi kelembagaan tertinggi dalam pembuat keputusan, pengelolaan, dan perencanaan wisata tersebut. Penelitian di Desa Cisampih menunjukkan bahwa masyarakat di sana tidak hanya terlibat dalam

perencanaan dan pelaksanaan saja, melainkan juga memiliki wewenang untuk memberikan masukan dan evaluasi bahkan melaporkan kesalahan langsung kepada kepala desa (jaro) jika terdapat ketidaksesuaian. Kontrol ini diperkuat dengan keterlibatan aktif dalam rapat musyawarah desa (musdes) dan memastikan hasilnya dimasukkan ke dalam anggaran pendapat dan belanja desa (APBDesa) (Suhartono et al., 2025).

Studi di Gampong TGK Dilaweung juga menunjukkan bahwa seluruh indikator derajat partisipasi sudah terpenuhi dalam pelestarian terumbu karang. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai praktik kontrol warga, karena masyarakat secara aktif mendukung pemerintah dan mencegah pihak perusak. Kontrol warga ini untuk memastikan bahwa proses pengembangan pariwisata berjalan sesuai dengan kepentingan komunitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak *elite* (Zalmita et al., 2020).

Hasil dari *citizen control* adalah menciptakan tata kelola yang sepenuhnya mandiri, transparan, dan sangat adaptif terhadap perubahan eksternal, yang merupakan bentuk pariwisata berkelanjutan yang ideal. Studi-studi kasus ini menunjukkan bahwa pendelagasian kekuasaan secara penuh menghasilkan sistem pengawasan sosial yang kuat, memperkuat akuntabilitas, dan menjamin bahwa pariwisata dioperasikan untuk kepentingan kolektif komunitas lokal.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* terhadap 18 artikel ilmiah, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Indonesia masih didominasi pada tingkat **Tokenism**, khususnya pada level *consultation*, yang menunjukkan bahwa masyarakat telah diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi belum memiliki kewenangan yang memadai dalam pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, praktik partisipasi yang mencapai tingkat **Citizen Power**—meliputi *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*—terbukti mampu menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih inklusif, mandiri, dan berkelanjutan melalui pembagian kewenangan yang lebih seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat perlu diarahkan pada peningkatan kualitas partisipasi dari sekadar pelibatan administratif menuju pemberdayaan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan, sehingga manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dapat dirasakan secara lebih adil dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah, pengelola destinasi wisata, dan pemangku kepentingan lainnya meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dari sekadar bersifat konsultatif (*tokenism*) menuju kemitraan yang lebih bermakna (*citizen power*) melalui pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pengembangan pariwisata, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kelembagaan lokal perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki kemampuan

dan kewenangan yang memadai dalam mengelola potensi wisata secara mandiri, sehingga tercipta tata kelola pariwisata yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abor, J., & Bokpin, G. A. (2010). Investment opportunities, corporate finance, and dividend payout policy. *Studies in Economics and Finance*, 27(3), 180–194. <https://doi.org/10.1108/10867371011060018>
- Aizid, R. (2016). *Biografi Ulama Nusantara*. Diva Press.
- Andi Mulyan, & Lalu Moh Yudha Isnaini. (2022). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Masmas Kecamatan Batu Kalias Utara Kabupaten Lombok Tengah)*.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Anwar, R., Darmawan, D., & Setiawan, C. (2016). Kajian Kitab Tafsir dalam Jaringan Pesantren di Jawa Barat. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(1), 56–69. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i1.578>
- Aulia, A. F., & Hasmira, M. H. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kelurahan Pasir Kota Pariaman. *Jurnal Perspektif*, 3(3), 422. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i3.308>
- Ben Purvis, Yong Mao, & Darren Robinson. (2018). Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins. *Environmental Conservation*, 14(2), 101–110. <https://doi.org/10.1017/S0376892900011449>
- Cretu, A. E., & Brodie, R. J. (2007). The influence of brand image and company reputation where manufacturers market to small firms: A customer value perspective. *Industrial Marketing Management*, 36(2), 230–240. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2005.08.013>
- Dinis Cahyaningrum, Dame Hasani, T., Wayan Adelia Mutiara Asri, N., Safitri, D., Dewi Kuntary Ibrahim, I., & Mataram, U. (2024). The Role of Community Participation Toward Economic Empowerment in the Tourism Sector. In *West Science Business and Management* (Vol. 2, Issue 04).
- Fany Permana, A., & Dewi, E. O. (2023). *Community Participation in Tourism Village Development and Its Impact on Local Community Economies*.
- Fifiyanti, D., Nathasya, N., & Africano, F. (2025). Women's Participation in Sustainable Tourism Village Development: Shifting from Tokenism to Meaningful Participation. *Journal of Tourism Sustainability*, 5(4), 256–270. <https://doi.org/10.35313/jtospolban.v5i4.185>
- Fitria Andjanie, I., Asyifa, N., Pratama, R. K., & Furqan, A. (2023a). STRENGTHENING COMMUNITY INVOLVEMENT: AN IN-DEPTH EXPLORATION OF THE COMMUNITY-BASED TOURISM (CBT) APPROACH IN LAMAJANG TOURISM VILLAGE, BANDUNG REGENCY. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 17(2), 182–205.
- Fuadi Laksono, N., Fatma Chawa, A., & Yuliati, Y. (2020). Pengelolaan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sawentar). *BRILIANT: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5. <https://doi.org/10.28926/briliant>

- Hutnaleontina, P. N., Bendesa, I. K. G., & Yasa, I. G. W. M. (2022). Correlation of community-based tourism with sustainable development to improve community welfare: a review. *International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events*, 6(2), 183–193. <https://doi.org/10.31940/ijaste.v6i2.183-193>
- Jamal, T. B., & Getz, D. (1995). Collaboration theory and community tourism planning. *Annals of Tourism Research*, 22(1), 186–204.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- M. Rezki Ramadani, & Mayarni, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kepariwisataaan Kelurahan Agrowisata Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 214–226. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).7749](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).7749)
- Maradita, F., & Aprirachman, R. (2023). Triple Bottom Line Model as a Solution for Sustainable Tourism Management in the SAMOTA Area, Sumbawa Regency: Economic, Social, and Environmental Perspectives. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 9(1), 92–107. <https://doi.org/10.38043/jimb.v9i1.55>
- Mariyani, S., & Lestari, A. (2021). Participation of Farmers in Counseling and Technical Training Activities for Merang Mushroom Cultivation in Kutaampel Village, Batujaya District, Karawang.
- Musadad, M. (2018). COMMUNITY PARTICIPATION IN NATURE TOURISM DEVELOPMENT: LESSONS FROM PINDUL CAVE IN YOGYAKARTA, INDONESIA. *Jurnal Kawistara*, 8(2), 169. <https://doi.org/10.22146/kawistara.27957>
- Nugrahanto, A. D. (2015). *Blusukan Dalam Sejarah : Dari Sambernyawa sampai Jokowi*. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/anton_djakarta/552a6008f17e61f003d623a6/blusukan-dalam-sejarah-dari-sambernyawa-sampai-jokowi
- Nurwanto. (2020). EVALUASI DAMPAK PEMBANGUNAN PARIWISATA MENGGUNAKAN KONSEP COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) DI KAWASAN WISATA TEBING BREKSI Evaluation of The Impact Tourism Development Using the Concept Community Based Tourism in The Tourist Area Tebing Breksi. In *Jurnal Kepariwisataaan Indonesia* (Vol. 14, Issue 2).
- Pratama, O., Sari, R. E., Kuntari, E. N., & Nilzam Aly, M. (2024). Sustainable Homestay Marketing Strategy: Triple Bottom Line Implementation for Post-Pandemic Economic Recovery in Pulesari Tourism Village. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.22146/jpt.95956>
- Pratiwi, A. P., Yuniarti, E., Pratiwi, N. N., Fitriani, M. I., & Septianti, A. (2025). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi daya tarik wisata Pantai Sungai Kinjil. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 20(1), 325. <https://doi.org/10.20961/region.v20i1.90533>
- Pratiwi, J. R., Parmawati, R., & Rifai, R. M. (2023). Community Participation Level of Penggung Village on the Agropolitan Region Development in Kecamatan Bandar Nawangan, Kabupaten Pacitan. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*, 14(1). <https://doi.org/10.21776/ub.jp.al.2023.014.01.04>
- Puspitasari Rochman, G., Siddatul Akliyah, L., Fardani, I., Tarlani, T., Hamada, F., & Nurhasanah, H. (2023). Effect of Community Participation Levels on Tourism

- Village Development. *KnE Social Sciences*.
<https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14371>
- Rahmawati, R., Yahiji, K., & Rusli, M. (2019). Mopo'alati Tradition In The Coastal Muslim Community At Molotabu Beach Bone Bolango District. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 4(1), 65–79.
<https://doi.org/10.15575/jw.v4i1.4080>
- Ross, S. A. (1977). The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach. *The Bell Journal of Economics*, 8(1), 23.
<https://doi.org/10.2307/3003485>
- Safrilul Ulum, & Dewi Amanatun Suryani. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*.
- Saputra, I. P. D. A. (2024). Pentingnya Pariwisata Berkelanjutan dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 4(02), 207–217. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4613>
- Satrio Wibowo, M., & Arviana Belia, L. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*. 6, 2023.
- Sendjaja Suhandi, A., Novianti, E., Oktavia, D., Khan, A. M. A., & Simatupang, W. P. (2022). Community Participation Process in Community-Based Tourism Development in Waerebo Traditional Village, Manggarai Regency, Flores. *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism*, 20(2), 67–82.
<https://doi.org/10.5614/ajht.2022.20.2.05>
- Sifa'ul Jannah, Mansur Afifi, & Baiq Saripta Wijimulawiani. (2023). Study of Community Participation in Tourism Village Development and its Impact on Community Economy in Kebon Ayu Village, Lombok, Indonesia. *English and Tourism Studies*, 1(2), 113–126. <https://doi.org/10.59535/ets.v1i2.145>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suarta, I. K., Meirejeki, I. N., Suja, I. K., Rahmad, R., & Utama, I. G. B. R. (2022). The Community Participation in the Development of Gunung Salak Tourism Village, Tabanan, Bali, Indonesia. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 3(1), 39–46. <https://doi.org/10.36256/ijtl.v3i1.224>
- Suhartono, B., Rivai, F. H., Hia, G. A., & Darto, M. (2025). Community-based Awareness Model of Development Participation: A Case Study in Cisampih Village, Banjarsari District, Lebak Regency, Banten Province. *KnE Social Sciences*, 10(15), 534–552. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i15.19212>
- Syarifuddin, D. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 141–157.
<https://doi.org/10.53682/jpjsre.v4i2.8024>
- Tri Amanah, R., Rina Herawati, A., Afrizal, T., Soedarto, H., & Tembalang Semarang Kotak, S. (2023). *ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA CIKURA KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL*.
- Wawo, M., Tetelepta, J. M. S., Willem Ayal, F., Mamesah, J. A. B., Rahman, &

- Hehakaya, T. B. (2025a). The Participation Level of The Local Community Towards Community-Based Tourism Development in Sopapei Tourism Destination, Ambon, Indonesia. *Media Konservasi*, 30(1), 96–105. <https://doi.org/10.29244/medkon.30.1.96>
- Yuniastoeti, V., & Rahmafitria, F. (2024). Analyzing local community participation and barriers in tourism village development: A case study of Mekarlaksana Village. *SPMS Spatial Planning & Management Science SPMS*, 1(2). <https://doi.org/10.61511/spms.v1i2.2024.1299>
- Zalmita, N., Furqan, M. H., & Usrati, Z. (2020). PARTISIPASI MASYARAKAT GAMPONG TGK DILAWUUNG TERHADAP PELESTARIAN TERUMBU KARANG DI KECAMATAN MUARA TIGA KABUPATEN PIDIE. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jsg/article/view/2507>